

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH FATIMIYAH

Andi Mutmainnah

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: : andi.mutmainnah029@gmail.com

Eka Febrianti

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ekafebrianti1308@gmail.com

Siradjuddin

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Nasrullah Bin Sapa

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The discussion of this article examines Islamic economic thought during the Fatimid Dynasty. The novelty of this research is the scope of research which focuses on the formation and development of the Fatimid dynasty, the economic policies of the Fatimid caliphs, economic figures during the Fatimid era, factors that influenced the progress of the Fatimid era, sectors that influenced the progress of the Fatimid era. built, and things that caused the decline of the Fatimid Daulah. The type of research method that the author used in writing this article is qualitative research with library data collection sources. The results of the research show that the Fatimid dynasty experienced progress during the time of the caliphs al-Mu'izz, al-'Aziz, and al-Hakim. This progress allowed the Fatimid Dynasty to rival the Abbasid Dynasty in Baghdad in Iraq and the Umayyad Dynasty in Andalusia, Spain. There are factors behind this, such as moving the center of government from Tunisia to Cairo, exploring sources of economic income in all fields, integrated management of Agriculture, Trade and Industry, high concern for Science, harmonious relations with other countries. non-Muslim countries, giving rise to very high tolerance towards society.

Keywords: *Fatimid Dynasty, History, Economic Figures, Sectors Developed, Islamic Economic Thinking*

Abstrak

Pembahasan artikel ini mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Fatimiyah. Kebaruan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang fokus pada terbentuknya dan berkembangnya Dinasti Fatimiyah, kebijakan perekonomian khalifah Fatimiyah, tokoh-tokoh perekonomian pada masa Fatimiyah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan zaman Fatimiyah, sektor-sektor yang berpengaruh pada kemajuan zaman Fatimiyah. dibangun, dan hal-hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Fatimiyah. Jenis metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber

pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan pada masa khalifah al-Mu'izz, al-'Aziz, dan al-Hakim. Kemajuan ini memungkinkan Dinasti Fatimiyah menyaingi jumlah Dinasti Abbasiyah di Bagdad di Irak dan Dinasti Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Adanya faktor yang melatar belakangi hal tersebut, misalnya berpindahnya pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo, menggali sumber-sumber pendapatan ekonomi di segala bidang, pengelolaan terpadu bidang Pertanian, Perdagangan, dan Industri, kepedulian yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan, hubungan yang harmonis dengan negara-negara non-Muslim sehingga menimbulkan toleransi yang sangat tinggi terhadap Masyarakat.

Kata Kunci: *Dinasti Fatimiyah, Sejarah, Tokoh Perekonomian, Sektor Yang Di Bangun, Pemikiran Ekonomi Islam*

DASAR PEMIKIRAN

Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti besar yang mencatat sejarah peradaban Islam. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama bertahun-tahun. Sepanjang dua setengah abad (297 hingga 567 M/909-1171 M), kekuasaan mereka meluas di berbagai wilayah meskipun aliran mereka tidak selalu mendapat dukungan mayoritas. Meskipun penguasa Fatimiyah menganut aliran Syiah Ismaili, mayoritas penduduknya mengikuti aliran Ahl as-Sunnah wa al-Jamaa (Suni). (Anshary 2016)

Di bawah kepemimpinan khalifah seperti al-Muiz, al-Aziz, dan al-Abdul, yang memerintah dari tahun 909 hingga 1171 Masehi, dinasti ini memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi, politik, ilmu sosial, dan budaya di Irak, menegaskan kesamaan antara khalifah dan monarki. Pengaruh Dinasti Fatimiyah masih terasa hingga kini melalui institusi seperti Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang pada masa itu menjadi pusat pengajaran ulama Islam di seluruh dunia, memperkenalkan beberapa ulama terkemuka seperti Jalaluddin al-Suyuti, Imam Subuki, al-Hafiz Ibnu Hajar al-Askalani, dan Ustaz Abdul Somad dari Indonesia. (Zamzam and Aravik 2019)

Dengan tekad yang tak kenal lelah dari Dinasti Fatimiyah, ekonomi berkembang pesat pada masa kejayaannya. Para khalifah dan pejabat negara di tingkat pusat dan daerah menikmati kemakmuran yang melimpah, sementara masyarakat merasakan kehidupan yang sejahtera dan kaya. Philip K. Hitti menyatakan kemakmuran ini dengan mengatakan bahwa seluruh bangsa sedang menikmati kekayaan dan kemakmuran, namun baru pertama kali negara ini berada pada tahun 438-441 M (1046-1049 M) dari Persia yang memerintah, dengan mengatakan, "Saya tidak bisa membatasi atau

mengevaluasi kemakmurannya; Saya belum pernah mengalami kemakmuran seperti itu di tempat lain." (Philip K. Hitti 1973)Pemikiran ekonomi Islam pada masa Fatimiyah berakar pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada saat itu adalah prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Pemerintah berupaya meningkatkan distribusi kekayaan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan menetapkan pajak yang adil bagi masyarakat kaya. Selain itu, periode Fatimiyah menyaksikan perkembangan dalam bidang keuangan Islam, termasuk dikenalnya sistem perbankan syariah yang pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Qadi Abu Yusuf pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada abad ke-8 Masehi. Sistem perbankan Islam pada masa Fatimiyah didasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan peminjaman (*murabahah*).

Artikel ini mengkaji ekonomi Islam pada masa Fatimiyah dengan merujuk pada penjelasan di atas. Hal ini penting karena tanpa dukungan ekonomi, peradaban di negara manapun di dunia tidak akan maju. Dalam kasus Dinasti Fatimiyah, ada manfaatnya untuk mempertimbangkan dan mengkaji berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan khalifah agar dapat diterapkan dalam kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode studi literatur. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang melibatkan berbagai usaha penting, seperti mencari dan mengumpulkan referensi serta menganalisis hasil data guna mengkaji masalah. Metode studi literatur adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang terdapat dalam literatur atau sumber-sumber tertulis lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di berbagai bidang ilmu, terutama dalam penelitian di bidang humaniora, sosial, dan ilmu-ilmu terapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca sumber melalui kumpulan beberapa artikel dan buku yang membahas mengenai pemikiran ekonomi islam pada masa daulah fatimiyah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang pemikiran ekonomi islam pada masa daulah fatimiyah.

PEMBAHASAN

1. Pembentukan Dan Perkembangan Fatimiyah

Salah satu kelompok dalam aliran Syiah, yaitu Syiah Ismaili yang merupakan bagian dari aliran Syiah Imamiyah, adalah salah satu yang berperan dalam mendirikan dinasti Fatimiyah. Dinasti ini mulai berdiri pada tanggal 21 Rabi al-Awal tahun 297 Hijriyah (tahun 909 Masehi). Pada waktu itu, pemimpin Syiah Ismaili, Ubaidullah al-Mahdi, mengumumkan pendirian kerajaan Fatimiyah di Raqqada, Suriah, yang berjarak sekitar empat mil selatan Damaskus. Di Qairawan, Maghrib Terdekat (saat ini Tunisia), Ubaidullah secara pribadi mengambil sumpah setia sebagai Khalifah. Masa kepemimpinannya berlangsung hingga 14 Rabi al-Awal tahun 322 Hijriyah (tahun 934 Masehi). (Taqi ad-Din Ahmad bin 'Ali al-Maqrizi 1971)

Kerajaan yang baru ini berhasil memperluas wilayahnya dengan cepat. Selama masa pemerintahan Ubaidullah al-Mahdi (297-322 H / 909-934 M), kerajaan itu berhasil menguasai sebagian wilayah di Maghrib Terjauh (Maroko modern) melalui al-Adalisa (Banu Idris) dinasti. Di sisi baratnya terletak Alexandria dan Delta Nil, sementara di utara terdapat Sisilia, Sardinia, Malta, Korsika, dan Kepulauan Balearic, yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti al-Agaribah (Banu Aghlab).

Pada masa pemerintahan Ubaidullah al-Mahdi, pusat pemerintahan dipindahkan dari Raqqada ke al-Mohammadiya, yang terletak di pantai Tunisia sekitar 90 km tenggara Qairawan. Setelah wafatnya Ubaidullah al-Mahdi, putranya Abu al-Qassim Muhammad (Nizar), yang juga dikenal sebagai alQaim bi Amrilla, melanjutkan ekspansi wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahannya (322-334 M / 934-945 M), dinasti Fatimiyah berhasil menguasai Genoa dan pesisir Calabria. Mesir ditaklukkan pada masa pemerintahan Khalifah keempat, al-Mu'izz li Dinira (memerintah 341-365 / 952-975 M). Pada tahun 358H (969 M), al-Mu'izz mengirim pasukan di bawah pimpinan panglima perang Jauhar al-Shikiri ke Mesir untuk merebut wilayah yang strategis. Kampanye Jauhar berhasil, dan Mesir jatuh ke tangan mereka. Untuk memperluas wilayah yang baru ditaklukkan oleh dinasti, Jauhar mendirikan sebuah kota baru yang dinamakan al-Manshriya. Peletakan batu pertama pembangunan

kota ini dilakukan pada tanggal 17 Syaban 358 M / awal Juli 969 M. (Hasan Ibrahim 1958) Kemudian, pada tahun 359 H (970 M) ia membangun mesjid al-Azhar yang belakangan menjadi Universitas alAzhar yang terkenal sampai sekarang.

Dibawah usaha gigih Jauhar Ash Shikiri, Armanshriya berkembang dengan cepat. Khalifah al-Muizz memindahkan markas pemerintahan dari Maghreb ke sebuah kota baru yang dinamakan al-Qahira (Kairo) pada tahun 362 M (973 M). (Hasan Ibrahim 1958) Pemerintahan Setelah periode ini, dinasti Fatimiyah memperluas wilayah kekuasaannya, memperkuat posisinya dalam sejarah dunia dan menciptakan kerajaan yang luas. Menurut Francesco Gabrieli, seorang penulis dari dunia Barat, kemenangan dinasti ini merupakan "kemenangan politik paling signifikan dari gerakan sesat Arab" (Francesco Gabrieli 1963)

Selain kemajuan dalam ranah politik dan ilmu pengetahuan, Dinasti Fatimiyah juga mencatat kemajuan signifikan dalam bidang ekonomi dan arsitektur. Dinasti ini mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan serta memajukan produksi tanaman seperti gandum, tebu, dan buah-buahan melalui sistem irigasi yang luas. Selain itu, seni dan kerajinan, seperti pembuatan kapal, senjata, tekstil, dan barang-barang rumah tangga, juga mengalami kemajuan. Perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga menjadi fokus penting bagi Dinasti Fatimiyah. (Muhammad Jamal 1979)

Periode Maghrib merujuk pada masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah yang pusat pemerintahannya terletak di al-Mahrab al-Adna (Tunisia). Periode ini dikenal sebagai "Periode Masyrid" karena perpindahan ibu kota ke Kairo, Mesir.

Dinasti ini berdiri di Raqqaddah pada tanggal 21 Rabiul Akil 297 M (909 M), yang menandai dimulainya Periode Maghrib, dan kemudian ibu kota dipindahkan dari al-Maghrim (al-Dina) ke Kairo, Mesir dalam bulan yang sama. Periode ini berlangsung hingga akhir Ramadhan 362 H (973 M). Selama periode ini, Dinasti Fatimiyah berkembang dan memainkan peran kunci dalam membentuk masa depannya. Periode ini juga mencatat perjuangan dinasti untuk memperkuat posisinya sebagai keluarga berpengaruh. Pemerintahan Ubaydullah al-Mahdi, Abu al-Qassim, dan Muhammad (Nizar) berlangsung sekitar 65 tahun; di mana mereka adalah empat khalifah: Ubaidullah al-Mahdi dan Mahdi (297–322/909–943 M), Al-Qaim bi Amrilla (H322-

334/AD934-945) yang juga dikenal sebagai Abu Tahir, Ismail bin Muhammad yang berasal dari keluarga yang sama dan dikenal sebagai al-Mansur bi Nasrurah (HS 341-3441/DH), dan Ma'ad bin Ismail dengan gelar Abu Tamim, al-Mu'izz li Dinillah (341-362 H/952-973 M). (Al-Maqrizi, Itti`azh 1988)

Era Masyrid dimulai saat ibu kota Dinasti Fatimiyah dipindahkan dari al-Maghrib al-Adna ke Kairo, Mesir, oleh al-Mu'iz li Dinira (khalifah keempat) pada bulan Ramadhan 362H (973 M). Peristiwa ini ditandai dengan kematian Khalifah terakhir (Khalifah ke-14), al-Adhid li Dinira, pada tanggal 10 Muharram 567 H. (1171 M). Era Masyrid menjadi masa terpanjang dan paling gemilang dalam sejarah Dinasti Fatimiyah. Dalam rentang periode 362-567 M/973-1171 M, jumlah khalifah hanya mencapai 11 orang. Kejayaan, kebesaran, dan keagungan diperoleh dinasti Fatimiyah pada periode tersebut.

Philip K. Hitti menggambarkan kemegahan Kerajaan Fatimiyah dengan menyatakan bahwa nama khalifah Fatimiyah terdengar dalam setiap khutbah Jumat, merentang dari pantai Atlantik hingga Laut Merah, Yaman, Mekkah, dan Damaskus, bahkan hingga ke Mosul. Wilayahnya sangat luas, yang membuat kekhalifahannya bukan hanya menjadi pesaing utama bagi Bagdad, tetapi juga mengikis keunggulannya. Dengan demikian, kekhalifahan ini menetapkan posisinya sebagai negara Islam terbesar di Mediterania Timur pada waktu itu.

2. Kebijakan Ekonomi Khalifah Fatimiyah

Kebijakan-kebijakan khalifah membawa masa keemasan Fatimiyah Daura dan berbagai kemajuan yang dinikmati hingga saat ini, adalah sebagai Berikut.

1) Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'izz lidinillah (341-365 H/953-975 M)

Selama masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah pada tahun 953 hingga 950 M, Khalifah al-Muizz juga dikenal sebagai khalifah keempat. Dia terkenal sebagai individu yang ramah, sopan, dan peduli terhadap rakyatnya. Menurut Ahmad Shalabi, al-Muizz Dinira memiliki kecerdasan, penguasaan bahasa yang luas, minat dalam bidang sains dan sastra, menggunakan taktik yang bijaksana, dan dihormati baik oleh teman maupun musuh. (Ahmad Syalabi 1974)

Khalifah al-Mu'izz mengadopsi strategi untuk meningkatkan perekonomian Abbasiyah dengan melakukan inspeksi menyeluruh pada seluruh wilayahnya untuk memahami situasi yang sebenarnya. Dia merancang program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, (Suyuthi Pulungan 2018) Untuk meningkatkan pendapatan pajak, memastikan keamanan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dalam sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan kerajinan, serta industri tekstil, keramik, perhiasan emas dan perak, kerajinan kaca, barang pecah belah, madu, obat-obatan, dan lainnya, dengan menjamin tersedianya lahan yang mendukung berbagai kegiatan produksi dan industry. (Syamsuddin Nasution 2013)

Perkembangan industri kerajinan telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan memberikan akses kepada mereka untuk menikmati barang-barang mewah. Al Muiz juga memperkenalkan koin dinar sebagai mata uang resmi untuk perdagangan dalam Dinasti Fatimiyah. Hal ini karena al-Mu'izz menyadari bahwa koin adalah alat komunikasi langsung antara dunia Islam dan masyarakat Mediterania. Koin menjadi lambang kekuasaan, kewibawaan, dan kedaulatan penguasa, bahkan dapat mencerminkan legitimasi pemerintah serta perubahan politik atau ideologi dalam suatu negara. (Sherif Anwar dan Jere L. Bacharach 2010) Berikutnya, dalam ranah hukum, Khalifah al-Mu'izz berusaha untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi semua tanpa adanya perbedaan perlakuan, serta memberikan ruang toleransi kepada semua individu dalam masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku, kasta, atau agama. (Didin Saefuddin Buchori 2009)

2) Abu Manshur Nizar Al-'Aziz Billah (365-386 H/975-996 M)

Pada zaman Dinasti Fatimiyah, Khalifah al-Aziz dilantik sebagai khalifah kelima. Pada usia 20 tahun, al-Aziz mengambil alih jabatan khalifah setelah ayahnya, al-Mu'izz. al-Aziz meninggal dunia pada usia 44 tahun pada tahun 368 H/996 M karena kesalahan dalam pemberian obat oleh dokter ketika ia jatuh sakit. Dia dikenal sebagai seorang khalifah yang berani, bijaksana, penyayang, baik hati, dan cinta damai. al-'Aziz' berusaha untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan mempromosikan bisnis yang juga memiliki nilai budaya dan sosial. Berbagai proyek konstruksi yang

mengesankan dilakukan di Kairo, termasuk pembangunan fisik dan pencapaian seni arsitektur. (Syamsuddin Nasution 2013) Contohnya adalah Istana Emas, Paviliun Pear, dan Masjid Karafa. Lebih lanjut, terjalinnya hubungan baik dengan Amir Bwayhya merupakan indikasi supremasi Abbasiyah telah terkikis dengan mengirimkan duta besar ke setiap dinasti.

3) Abu Ali Manshur al-Hakim Ibn Amrillah (996-1021 M)

Al-Hakim naik takhta setelah ayahnya, Al-Aziz, pada usia 11 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh para wazir dan dipengaruhi secara negatif oleh Gubernur Barjawan, yang terkenal karena perilakunya yang buruk dan tidak bermoral. Akibatnya, pada awal masa pemerintahannya, terjadi banyak tindakan sewenang-wenang dan ketidaktoleranan, terutama terhadap mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Mulai dari pembunuhan yang tidak beralasan terhadap banyak anggota keluarga kerajaan hingga perlakuan tidak adil terhadap orang Yahudi dan Kristen. Selain itu, munculnya kelompok ajaran Syiah Ismaili, yang dikenal sebagai sekte Jure, di Suriah selatan dan Lebanon, yang memandang Khalifah al-Hakim sebagai perwujudan Tuhan, juga menjadi sorotan. Salah satu tindakan paling kontroversial yang dilakukan oleh Al-Hakim bi-Amri Allah adalah penganiayaan terhadap komunitas Yahudi dan Nasrani serta penghancuran tempat-tempat ibadah, termasuk pemusnahan Makam Suci di Yerusalem (Palestina) pada tahun 1009 M. (Johannes den Heijer 2015) Tindakannya telah menjadi sebab utama terjadinya perang Salib.

Al-Hakim mengeluarkan perintah agar umat Nasrani harus mengenakan jubah hitam, sementara umat Yahudi harus membawa lonceng di atas lembu. Para umat Kristiani diwajibkan membawa salib di atas keledai. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan dan kebencian antara kelompok minoritas dengan non-Syiah Muslim. (Susmihara 2016)

3. Tokoh Ekonomi Pada Masa Daulah Fatimiyah Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi (180-402H/796-1011M)

1. Latar Belakang Kehidupan dan Karya Abu Ja'far al-Daudi

Al-Daudi berada di wilayah Afrika Utara saat pemerintahan Fatimiyah Daula dimulai pada tahun 296 M (910 M) yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi. Mazhab ini, yang didirikan oleh pendiri Negara Fatimiyah di wilayah Eropa Utara, kini dikenal sebagai Syiah Ismaili di Maghrib (Tunisia). Kedatangan aliran Syiah Ismaili sebagai bagian dari mazhab Fatima Dawla memicu konflik dengan mazhab yang dominan di masyarakat Maghreb pada saat itu, yaitu Sunni (Hanafi dan Maliki). (Hamim Umran 2009) Fenomena dalam kehidupan sosial ini mempengaruhi kiprah al-Dawdi sebagai ulama Sunni mazhab Maliki. Philip K. Hitti menyatakan bahwa Daulah Fatimiyah merupakan satu-satunya Daulah yang didirikan di Maghreb (Tunisia).

Sumber utama pendapatan masyarakat Maghrib selama masa pemerintahan Fatimiyah di Maghreb terutama berasal dari sektor pertanian, yang menghasilkan berbagai jenis biji-bijian. Di wilayah Masira, sektor peternakan, khususnya, menghasilkan berbagai hewan ternak seperti keledai, kambing, dan kuda. Perdagangan pakaian berbahan wol telah mulai berkembang. Pusat-pusat perdagangan terletak di wilayah timur seperti Burqa, Ajdabiya, Taraburs, Madiya, dan Khairwan, serta di daerah tengah seperti Baskara dan Tauraqa, dan juga di daerah Maghrib Al-Aqsa seperti kota Fass dan Tanja. Sektor perikanan terutama berkembang di pantai utara Afrika, di mana masyarakat mencari penghidupan melalui penangkapan ikan dan berburu Mutiara. (Shalah al-Din Husein Khidir 2010)

Al-Daudi terkenal sebagai seorang cendekiawan yang mempertahankan ajaran Sunni dan memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh dan hadis. Pengetahuan ekonominya, pada dasarnya, berasal dari Al-Quran, Sunnah (ajaran Islam), riwayat para Sahabat, dan pendapat para ulama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia menentang keras kebijakan ekonomi Fatimiyah di bawah pemerintahan Ubaidillah al-Mahdi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan meremehkan hak kepemilikan individu dan masyarakat. Pemikiran-pemikiran ini terdokumentasikan dalam karyanya yang berjudul "al-Amwâl".

2. Kitab *al-Amwal* Karya al-Daudi

Beberapa cendekiawan dalam sejarah peradaban Islam telah memperhatikan topik keuangan publik dalam karya-karya mereka. Kitab *al-Kharâj*, yang ditulis oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi al-Baghdadi (113-182 H/731-798 M), Yahya bin Adam (wafat 203H), dan Qudama bin Ja'far (wafat 329 H), serta kitab *al-Amwâl*, yang disusun oleh beberapa cendekiawan termasuk Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Harawi (157-224 H/774-838 M) dan Humaid bin Makhlad Zanjawaih bin Qutibah al-Azdi al-Nasai (180-251 H/865 M), merupakan bagian dari warisan intelektual peradaban Islam yang mengulas topik ini. Salah satu di antaranya, Abu Ja'far al-Daudi (wafat 402 H), juga merupakan cendekiawan yang memberikan sumbangan penting dalam mengembangkan teori tentang kebijakan dan keuangan publik dalam Islam. Karyanya yang berjudul *al-Amwâl*, seperti karya-karya Abu Ubaid dan al-Zanjawaih, memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman topik tersebut.

Menurut Tahqiq yang disajikan oleh Rida Muhammad Salim Shahada untuk Kitab *Al-Daudi*, ada beberapa alasan mengapa Kitab *Amwar Al-Daudi* menjadi rujukan penting. Pertama, keaslian kitab dan kepakaran al-Daudi dalam bidang keimanan, yurisprudensi, dan hadis menjadikannya sebagai karya referensi utama pada saat itu. Kedua, buku ini mencerminkan pandangan ekonomi al-Malikiyah al-Daudi serta penyusunan dan penyempurnaan tulisan-tulisan Ismail bin Ishaq al-Qadi. Ketiga, al-Daudi meyakini bahwa ekonomi Islam tidak hanya berdasarkan konsep ilmiah tetapi juga praktis. Oleh karena itu, karyanya dianggap penting dalam menjelaskan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks aset nasional dan sebagai panduan bagi para ekonom pada masa itu. Keempat, al-Daudi membahas instrumen Islam terkait kebijakan publik dan teori kekayaan. Kelima, al-Daudi berhasil menggabungkan berbagai konsep ilmiah yang tersebar dan mengokohkan pandangan-pandangan yang paling benar. Terakhir, melalui penerapan kebijakan ekonomi, Al-Daudi berhasil menciptakan kebahagiaan, keamanan, dan ketenangan. (Al-Daudi 2011).

3. Perbedaan antara Kitab *al-Amwal* al-Daudi dengan Kitab *al-Kharâj* Abu Yusuf dan Kitab *al-Amwal* Abu 'Ubaid.

Uniknya kitab *al-Amwâl* karya al-Daudi tentu berbeda dari karya-karya ulama terdahulu seperti Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid. (Muhammad Ziyab 2007) Buku "*Al-Amwal*" yang ditulis oleh al-Daudi, dengan gambar Ramadhan di dalamnya, merupakan kritik dari al-Daudi terhadap paradigma ideologi yang dominan pada masanya, baik dari kalangan Syiah maupun al-Zahiriyya. Ini juga menjadi upaya al-Daudi untuk menghidupkan kembali pemikiran Sunni di kalangan ulama pada masa itu. Sebagai hasilnya, kitab "*Al-Amwal*" menjadi sebuah karya referensi yang sangat otoritatif. Perbedaan utama dengan "*Kitab al-Amwar*" terletak pada peran dan posisi al-Daudi sendiri. Di sisi lain, Abu Yusuf menulis "*Kitab Al-Kharaj*" atas permintaan dari penguasa pada saat itu, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf cenderung tidak bersifat objektif. Hal ini dapat dilihat dari kebebasannya dalam menyampaikan pendapat yang sering kali bertentangan dengan tradisi ekonomi yang berlaku pada masa itu, termasuk kebijakan penguasa. Oleh karena itu, penelitian Abu Yusuf dapat dianggap sebagai bagian dari agenda yang digagas oleh Khalifah Harun al-Rasyid.

Adanya perbedaan dengan karya Abu Yusuf, al-Dawdi menulis "*Al-Amwal*" berdasarkan penelitian yang komprehensif dan bukan atas perintah langsung dari penguasa pada masa itu, yaitu Khalifah Fatimiyah Ubaidillah al-Mahdi. Penelitian ini melibatkan kritik terhadap kebijakan ekonomi penguasa saat itu dan realitas praktik ekonomi yang dialami oleh masyarakat setempat. Selain itu, sebagai seorang pakar di bidang fiqh, ia sering memimpin diskusi, menyanggah gagasan-gagasan yang keliru, dan menjawab berbagai pertanyaan baru yang dihadapi oleh masyarakat.

Perbedaan yang mencolok antara kedua karya tersebut ialah: (Al-Daudi 2011) (1) Karya-karya Abu 'Ubaid, yang dipublikasikan sebelum kematiannya pada tahun 2224 M, mengandung berbagai pengetahuan yang luas dan komprehensif, serta berbagai pandangan dari para ulama. Meskipun upaya Al-Daudi dalam memberikan solusi bagi tantangan zaman hanya mencakup bidang-bidang tertentu, (2) Al-Daudi mengemukakan berbagai pendapat bahkan memaparkan permasalahan dengan mengkritisi pendapat al-Qadi. (3) Tulisan Al-Daudi memuat fatwa-fatwa mengenai permasalahan perekonomian yang dihadapi masyarakat saat itu, sedangkan tulisan Abu Ubaid memuat teori-teori ekonomi. (4) Kitab *al-Amwal* yang ditulis oleh Abu Ja'far al-Dawdi berusaha untuk

menerapkan berbagai konsep keuangan Islam yang relevan dengan konteks masa itu. Ia berkeinginan untuk menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik dalam masyarakat pada periode tersebut.

4. Pemikiran Ekonomi Abu Ja'far al-Daudi

Al-Daudi menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menangani permasalahan-permasalahan kecil yang timbul dalam masyarakat. Prinsip pertama menegaskan bahwa sumber utama pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi, adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut karya Al-Daudi, setiap individu diwajibkan untuk mengikuti ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat dalam wahyu. (Al-Daudi 2011)

Kedua, prinsip tauhid. Landasan argumen ekonomi Islam selalu berpijak pada kebenaran. Pertumbuhan ekonomi Islam tidak bisa didasarkan pada prediksi atau kebijakan yang bertentangan dengan realitas. Baik itu investasi dalam industri, perdagangan, pertanian, atau jasa, semuanya selalu disesuaikan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam erat terkait dengan keyakinan Islam. Al-Daudi menegaskan bahwa tingkat iman seseorang Muslim dapat diukur dari seberapa baik interaksinya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dari prinsip tauhid ini muncul dua prinsip lanjutan: prinsip keadilan dan prinsip kebijaksanaan. (Qoyum et al. 2021)

Ketiga, al-Daudi merujuk pada "aturan al-Masyru'iyah", yang berarti bahwa segala sesuatu yang diperoleh seseorang harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika harta diperoleh melalui cara yang tidak sosial, maka harta tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi, tetapi harus menjadi milik bersama dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat. (Al-Daudi 2011) Keempat, kaidah *quwwah aliqtisad* (kekuatan ekonomi) dan bukan *la iqtisad al-quwwah* (bukan perekonomian yang kuat). (Muhammad Ziyab 2007)

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemajuan Ekonomi Dinasti Fatimiyah

Setelah pemerintahan Dinasti Abbasiyah di Bagdad dan Bani Umayyah di Andalusia, Kerajaan Fatimiyah mencapai puncak kejayaan sebagai salah satu periode terkemuka dalam sejarah dunia Islam. Para khalifah Fatimiyah, mulai dari Khalifah Ubaydillah al-Mahdi (909-924 M) hingga Abu Ali Mansur al-Hakim (996-924 M), fokus pada peningkatan aspek spiritual masyarakat Islam sambil mengurangi dampak kerusakan moral dan korupsi. Mereka bertanggung jawab dalam memperoleh kemakmuran ekonomi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, memastikan distribusi yang adil dan menghapus praktik eksploitasi. Hasilnya, berbagai bidang mengalami perkembangan dan kemakmuran, yang utama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. (Fakhry dan Havis 2019)

Setidaknya adanya enam faktor yang sangat berpengaruh dalam kemajuan ekonomi dinasti Fatimiyah, yaitu:

1) Perpindahan pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo

Jawar al-Siqili mempunyai Strategi politik yang mencakup penaklukan Kairo (Mesir) dan pendirian kota baru yang dinamakan al-Qahirah, yang artinya Kota Kemenangan, menjadikannya pusat kekuasaan Fatimiyah. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam kemajuan awal peradaban tersebut. Terdapat dua aspek yang relevan dalam hal ini. Pertama, dalam konteks politik nasional, Mesir memiliki posisi strategis yang dekat dengan Suriah, Palestina, dan Hijaz, serta merupakan kota politik di bawah pemerintahan dinasti Ikhsyidiyah menurut peta politik.

Kedua, dari segi ekonomi, Mesir memiliki kondisi geografis yang sangat subur dan menjadi jalur perdagangan vital ke India melalui Laut Merah, Italia, Mediterania Barat, dan Kekaisaran Bizantium. Selain itu, Sungai Nil dianggap sebagai arteri transportasi utama oleh Dinasti Fatimiyah untuk mengangkut barang dari Afrika dan Samudera Hindia ke Kairo dan Alexandria. (Delia Cortese 2015) Karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan jika Mesir menjadi salah satu pusat pertanian dan perdagangan terkemuka di dunia setelah Bagdad dan Cordova. Sektor pertanian dan perdagangan kemudian menjadi sumber pendapatan finansial baru bagi Dinasti Fatimiyah, yang sebelumnya tidak dapat diakses ketika pusat pemerintahan berada di Tunisia.

2) Penggalan sumber pemasukan ekonomi dalam segala bidang

Sumber pemasukan ekonomi negara mengalami peningkatan akibat Para Khalifah Dinasti Fatimiyah sangat cerdas mengelola sumber pemasukan ekonomi negara. Setidaknya ada tiga sumber pemasukan ekonomi pada Dinasti Fatimiyah, antara lain

a. Pajak

Dinasti Fatimiyah utamanya menggantungkan pendapatan negara pada pajak dari sektor pertanian dan peternakan. Hal ini disebabkan oleh kesuburan Mesir serta keberadaan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta yang melimpah di wilayah tersebut. Pajak pertanian diwajibkan untuk dibayar setelah masa panen dan harus lunas sebelum dimulainya musim tanam berikutnya. (Delia Cortese 2015)

Pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Perdana Menteri Yaqub ibn Keres menghasilkan jumlah yang sangat besar. Di wilayah Fustat saja, pajak berkisar antara 120.000 hingga 500.000 dinar setiap hari. Demikian juga di Dimyat, pajak kota mencapai lebih dari 200.000 dinar per hari. Di bawah kepemimpinan Wazir al-Hasan bin "Pak Ali Al Yazri," penerimaan pajak mencapai sekitar 2.000.000 dinar per tahun. Ada tambahan 1 juta dinar per tahun dari Syam. Hal ini merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir. (Syamsuddin Nasution 2013).

b. Al-Jawali/Jizyah

Al-Jawali atau Jizyah adalah kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh non-Muslim zimmi yang tinggal di wilayah Islam yang merdeka setelah mencapai usia dewasa, namun tidak berlaku bagi wanita dan anak-anak kecil. Jizyah menjamin perlindungan terhadap nyawa, harta, dan kebebasan beragama tanpa ada batasan. Selain itu, mereka tidak diwajibkan untuk berdinam militer dan diberikan jaminan sosial. (Havis Aravik 2016) Sebagai acuan, hasil yang dapat diperoleh dari sistem Jawali ini, dapat dilihat dengan jumlah Jawali tahun 587 M mencapai 30.000 dinar.

c. Al-Makus

Al-Makus merujuk pada tarif yang diwajibkan untuk industri, yang diterapkan melalui dua cara. Pertama, barang-barang impor yang memasuki kota-kota Mesir seperti Alexandria, Tunisi, dan Fusha dikenakan bea masuk. Misalnya, pedagang dari Konstantinopel dikenakan biaya sebesar 35 dinar untuk setiap 100 dinar yang mereka impor ke Mesir, yang setara dengan tarif bea masuk sebesar 35%. Metode kedua adalah

tarif, yang dikenakan pada industri dan pedagang yang beroperasi di Mesir. (Syamsuddin Nasution 2013)

3) Pengelolaan bidang-bidang Pertanian,

Pemerintah Mesir telah mengalokasikan banyak investasi dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam perdagangan umum dan industri. Mereka telah membangun sistem irigasi untuk mengalirkan air dari Sungai Nil ke lahan pertanian, sementara lumpur dari Sungai Nil digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Pendapatan mereka berasal dari berbagai hasil pertanian seperti kurma, gandum, kapas, gula tebu, bawang merah, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga menganjurkan penggunaan kayu untuk pembangunan dermaga, kapal, dan kapal dagang.

Dinasti Fatimiyah telah menjadi salah satu dinasti yang paling maju, sejajar dengan kemajuan Bani Abbasiyah di Bagdad dan Bani Umayyah di Cordoba, Andalusia, berkat strategi manajemen mereka dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Istana khalifah dapat menampung 30.000 orang, termasuk 12.000 pelayan dan pengawal serta 10.000 penunggang kuda. Kota New Cairo yang dihiasi oleh kediaman khalifah juga dilengkapi dengan masjid-masjid besar, universitas, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah, berbagai kota juga dilengkapi dengan fasilitas pemandian umum yang berkualitas. (Susmihara 2016)

4) Kepedulian yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan

Kemajuan ekonomi suatu bangsa sangat tergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan. Dari zaman klasik hingga saat ini, tidak ada negara besar yang mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa dukungan ilmu pengetahuan yang signifikan. Para khalifah Fatimiyah dikenal sebagai pengagum ilmu pengetahuan. Al-Mu'iz mendirikan Universitas Al-Azhar, yang dibuka pada tanggal 7 Ramadhan 361 Hijriah (22 Juni 972 Masehi). Al-Aziz membangun perpustakaan besar di istananya yang berisi satu juta buku mengenai berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, al-Aziz dan perdana menterinya, Yaqub ibn Qirz, mendirikan perpustakaan besar di Al-Azhar yang memfokuskan pada ilmu agama, logika, dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Al-Azhar juga menyediakan asrama bagi para Fuqaha (guru) untuk mendukung kegiatan pendidikan mereka, dengan Khalifah menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya secara gratis sebagai sumber pendapatan utama mereka. (Syamsuddin Nasution 2013)

5) Adanya hubungan dagang yang harmonis dengan dunia non-Muslim

Al-Mu'izz dan putranya al-Aziz dikenal sebagai khalifah yang sangat menghargai keragaman agama, bahkan seringkali memperlakukan non-Muslim dengan sikap yang sangat baik. Di sektor perdagangan, kota-kota seperti Fustat, Kairo, Diniyat, dan Qas tumbuh menjadi pusat-pusat perdagangan, sementara kota pelabuhan Alexandria berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang memfasilitasi hubungan perdagangan dengan India dan negara-negara Kristen di sekitar Laut Tengah. Kehadiran pusat perdagangan dan pelabuhan di Alexandria sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Dinasti Fatimiyah, memberikan kekayaan dan kemakmuran bagi masyarakat Mesir dan komunitas Islam secara luas. (Asriati Amaliyah 2013)

6) Pemberian toleransi yang sangat tinggi terhadap masyarakat

Khalifah al-Muizz dan al-Aziz dikenal karena dedikasi yang teguh terhadap hak-hak asasi manusia. Selama masa kekuasaan mereka, prinsip toleransi dihargai secara tinggi. Penunjukkan individu untuk jabatan pemerintahan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan emosional, agama, atau latar belakang etnis, melainkan berdasarkan pada kompetensi. Bahkan, non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi juga menduduki posisi penting dalam struktur pemerintahan. (Abdul Karim 2007) Contohnya, saat beliau menunjuk Isa, seorang Nasrani, sebagai salah satu menterinya, juga menunjuk Yakub, seorang Yahudi, dan Abu al-Fath al-Mansur, seorang Nasrani, sebagai tabib pribadi khalifah dan putranya. Demikian juga, non-Muslim menikmati kehidupan damai dan sejahtera pada masa al-Mutansir. Secara faktual, sebagian besar jabatan keuangan dipegang oleh pejabat bukan Muslim. Banyak gereja yang direnovasi dan banyak orang Kristen yang menduduki posisi kunci dalam pemerintahan. Semua ini mencerminkan kebaikan hati Khalifah yang menghargai keragaman antar bangsa dan tingkat toleransi yang tinggi. (Samsul Munir 2009)

Hal yang sama berlaku untuk umat Islam lainnya, meskipun kaum Fatimiyah menjadikan Syiah Ismailiyah sebagai sekte nasional mereka dan mengamalkannya dengan serius dalam kehidupan mereka, namun mereka tidak memaksa Sunni untuk mengikuti kelompok mereka. Berbagai kebijakan memberikan dampak besar terhadap

kesejahteraan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat dan negara yang harmonis dan damai. (Susmihara 2016)

5. Sektor-Sektor Ekonomi Yang Dibangun

Dinasti Fatimiyah menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan menggalakkan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan memajukan kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan ini menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang didorong, diusulkan, dan ditingkatkan oleh Dinasti Fatimiyah.

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Dinasti Fatimiyah mengutamakan sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan perdagangan. Namun, di antara sektor-sektor tersebut, pertanian mendapat perhatian dan investasi yang lebih besar karena dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Mesir pada masa itu.

Pertanian Mesir sangat bergantung pada kualitas dan volume air Sungai Nil. Apabila debit air rendah, lahan pertanian akan mengalami kekeringan; sebaliknya, jika debit air tinggi, lahan akan tergenang. Kedua situasi tersebut tidak menguntungkan. Ketinggian ideal Sungai Nil adalah 16 hasta, dengan batas yang dapat ditoleransi adalah 15 atau 17 hasta. Ketika ketinggian mencapai 18 hasta, terjadi banjir yang merugikan pertanian. Sebaliknya, jika ketinggian kurang dari 14 hasta, lahan pertanian akan mengalami kekurangan air. Karena itu, penguasa Fatimiyah melakukan pemantauan terus menerus terhadap perkembangan debit air Sungai Nil ini.

Dengan dedikasi yang bersungguh-sungguh, sektor ini menghasilkan berbagai produk pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan masyarakat. Produk-produk tersebut meliputi gandum, kacang-kacangan, kedelai, adas, bawang putih, bawang merah, jinten, lobak, semangka, tebu, umbi-umbian, terong, kapas, dan lain sebagainya. Di antara berbagai hasil pertanian tersebut, gandum memegang peranan yang paling penting karena menjadi makanan pokok bagi masyarakat. Pertanian gandum umumnya dilakukan di lahan subur yang sangat luas di Mesir. Selain itu, sektor perkebunan juga berhasil menghasilkan beragam buah-buahan seperti anggur, buah ara, apel, pisang, dan kurma.

2. Sektor Kerajinan Pembinaan dan pengembangan

Salah satu strategi Dinasti Fatimiyah dalam mengelola sektor kerajinan adalah dengan mendirikan fasilitas pengolahan kerajinan tangan dan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi mereka. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor ini meliputi tekstil, kaca, kristal, gerabah, kapal, kertas, gula, minyak goreng, dan sabun. Selama periode Fatimiyah, terdapat banyak kapal terkenal yang dibuat, termasuk kapal untuk transportasi penumpang dan kargo, serta kapal yang digunakan dalam konteks perang atau perang saudara. Lokasi-lokasi terkenal untuk pembuatan kapal termasuk Maqs, Iskandariyah, dan Dimiyath. (Al-Maqrizi 1988)

Pada zaman Fatimiyah, permintaan akan kertas meningkat dengan cepat karena kemajuan dalam bidang pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong pertumbuhan produksi kertas berbagai ukuran dan jenis. Salah satu kota yang terkenal dengan produksi kertasnya adalah Fustas, di mana mereka memproduksi jenis kertas yang disebut al-waraq al-manshri.

Bersamaan dengan meningkatnya produksi kertas, teknik penjilidan buku juga terus berkembang. Biasanya, sampul buku dibuat dari kulit sapi, kecuali untuk buku-buku khusus yang menggunakan sampul sutra polos atau sutra yang dihiasi dengan lukisan atau gambar tertentu. (Hasan 2016)

Kulit juga digunakan untuk membuat tikar dan pelana kuda. Banyak produk keset kulit diproduksi di Fustas dan diekspor ke negara-negara seperti Syam. Saat ini, seni pembuatan pelana kuda diperhalus dengan detail dan estetika yang tinggi, menghasilkan karya seni berkualitas tinggi. Beberapa pelana kuda bahkan dihias dengan emas atau perak, menjadikannya barang mewah yang harganya bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 dinar.

Selain itu, produksi gula juga merupakan kerajinan penting pada masa Fatimiyah. Ada dua jenis gula yang dihasilkan: gula kristal dan gula cair. Kedua produk ini sangat diminati dan menjadi barang standar yang laris di pasar. Selain produksi gula secara besar-besaran, pertanian tebu juga berkembang pesat. Petani didorong untuk menanam tebu sebanyak mungkin, dengan panen biasanya dilakukan pada bulan Hathur dan

hasilnya diangkut ke pabrik gula. Tempat pengolahan gula cair disebut Al Ma'ashir, sementara tempat pengolahan gula kristal disebut Al Mathabikh atau Al Masabik.

Minyak nabati juga merupakan produk yang populer pada masa Fatimiyah. Untuk mendorong pengembangan industri ini, Dinasti Fatimiyah mendirikan banyak pabrik pengolahan minyak nabati. Masyarakat aktif dalam penanaman tanaman penghasil minyak seperti zaitun dan simsim. Zaitun ditanam secara luas di wilayah Fayoum dan Alexandria, sementara simsim ditanam di hampir seluruh wilayah negara. Zaitun digunakan untuk menghasilkan minyak zaitun, sedangkan simsim diolah menjadi minyak yang dikenal dengan nama Asy-Syaraj.

Selain itu, kerajinan tangan lainnya termasuk pembuatan lilin dan sabun. Tempat pembuatan lilin tersebar di seluruh Alexandria, sementara tempat pembuatan sabun terdapat di Fustas.

3. Sektor Perdagangan

Pada saat pemerintahan Dinasti Fatimiyah, sektor komersial berkembang dengan berhasil. Dua kota yang sangat signifikan sebagai tempat perdagangan adalah Fusthath dan Iskandariyah. Fusthath adalah yang terbesar di antara keduanya. Kota ini bukan hanya merupakan kota kuno yang pernah menjadi ibu kota Mesir, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan kerajinan terkemuka karena posisinya yang strategis di tepi Sungai Nil dan kemudahan akses dari berbagai arah, baik melalui darat maupun sungai.

6. Kemunduran Ekonomi Dinasti Fatimiyah

Runtuhnya ekonomi yang menjadi penyebab utama kejatuhan Dinasti Fatimiyah, terutama di bawah pemerintahan Khalifah al-Adhid. Mereka diserang oleh pasukan Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi, dan juga terlibat dalam perang saudara serta pemberontakan Sunni yang berkelanjutan. Serangan Tentara Salib menyebabkan wilayah-wilayah pertanian utama terbengkalai, mengakibatkan pelemahan Dinasti Fatimiyah sementara memperkuat posisi lawannya.

Paling tidak, terdapat 4 faktor penting yang menyebabkan kemunduran ekonomi pada masa Dinasti Fatimiyah, yaitu:

a) Kebencian berlebih dan Politik diskriminatif terhadap masyarakat Sunni

Untuk menjamin dominasi aliran Syiah Ismaili dalam aspek kepercayaan dan kekuasaan agama, para khalifah Fatimiyah mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan segala kelompok yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Contohnya, Khalifah al-Aziz menugaskan perdana menteri untuk menulis dan menyusun buku komprehensif tentang Fiqih Syiah dan ajaran-ajaran penting para ulama Fuqaha. Semua pejabat diwajibkan berasal dari kalangan Syiah Ismaili, dan semua qadi atau hakim diharuskan mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syiah. Selanjutnya, mereka menyebarkan atau mengembangkan ajaran Syiah Ismaili di kalangan. (Syamsuddin Nasution 2013)

b) Kehidupan khalifah Fatimiyah yang melampaui batas

Adanya beberapa khalifah Fatimiyah yang telah memerintah dikenal karena gaya hidup mewah dan kemewahan yang berlebihan, yang menjadi alasan bagi orang-orang untuk mulai membenci mereka. Contohnya, seperti Az-Zahir (1021-1036 M), Al-Musthansir (1036-1094 M), Al-Musta'li (1094-1101 M), dan Al-Amir (1101-1131 M), serta Hafiz (1131-1149 M), Azh-Zhafir (1149-1154 M), Al-Faiz (1154-1160 M), dan Al-'Adhid (1160-1171 M), yang terlibat dalam gaya hidup mewah dan tinggal di istana-istana yang megah. Meskipun Kairo menikmati banyak kesenangan dalam kehidupan dunia, urusan politik biasanya diurus oleh perdana menteri (Wazir). (Syamsuddin Nasution 2013)

c) Perang Salib

Terjadinya Perang Salib telah menjadi pemicu kunci dalam mempercepat penurunan ekonomi dan kejatuhan Dinasti Fatimiyah. Terlebih lagi, terjadinya konflik yang mencapai puncaknya antara Dinasti Fatimiyah dan penduduk Mesir. Khalifah al-Adid dan menterinya Abu Shuja Shawar bin Muahir terpaksa mencari bantuan dari Nuruddin Zanki, penguasa Syam dan Aleppo, untuk melawan Tentara Salib. Berkat bantuan ini, Tentara Salib akhirnya dipaksa untuk mundur dari Mesir. Namun, dana yang dialokasikan untuk perang Salib telah habis sepenuhnya, dan pasukan Nuruddin

Zanki dipanggil untuk memberikan bantuan. Akibatnya, kekayaan negara terkuras, menyebabkan dampak negatif pada ekonomi dan ketentraman masyarakat.

d) Rapuhnya politik keagamaan khalifah Fatimiyah

Kematian Khalifah al-Hakim menyebabkan kepemimpinan yang kurang kompeten mengemban tugasnya. Kekhalifahan sering kali hanya berperan sebagai simbol, dengan pelaksanaan tugas-tugasnya yang sebenarnya sering kali didelegasikan kepada perdana menteri (wazir). Sebab, ini karena penerus yang diangkat setelah kematian khalifah seringkali masih di bawah umur, seperti halnya al-Hakim yang menjadi khalifah pada usia 11 tahun, al-Zahir yang naik takhta pada usia 16 tahun, dan al-Mustansir yang menjadi khalifah pada usia sebelas tahun, sementara Al-Amir berusia lima tahun, Al-Faiz empat tahun, dan Al-Adid sembilan tahun ketika mereka naik takhta. (Susmihara 2016)

e) Bencana alam

Pada saat pemerintahan Khalifah al-Hakim, tampaknya Sungai Nil kehilangan pentingnya sebagai sumber perekonomian masyarakat. Bahkan, di bawah kepemimpinan Khalifah al-Zahir, dinasti Fatimiyah terus menghadapi masalah banjir, sementara kebijakan yang tidak populer terhadap perekonomian domestik menyebabkan kelangkaan pangan dan tidak terjangkaunya kenaikan harga barang bagi masyarakat. Karena ini menimbulkan ketidakpuasan luas di golongan penduduk. Pada masa pemerintahan Khalifah Ma'ad al-Muntashir, terjadi bencana kelaparan yang parah selama 7 Tahun (1065-1072 M). Sumber air utama di Mesir, Sungai Nil, mengalami dampak dari kekeringan yang meluas di seluruh negeri. (Suyuthi Pulungan 2018)

SIMPULAN

Kesimpulan mengenai ideologi ekonomi Islam era Fatimiyah menekankan pada beberapa ciri yang eksklusif pada masa ini. Dinasti Fatimiyah menandai periode penting dalam sejarah Islam ketika ide-ide ekonomi dipelajari, diperdebatkan, dan diterapkan secara luas. Ciri utamanya adalah penerapan teori ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada masa Fatimiyah, terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, khususnya di sektor pertanian dan komersial. Kekayaan dan

kemakmuran mencakup berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penguasa Fatimiyah seperti al-Mu'izz dan al-Dawdi mengambil langkah strategis untuk mengontrol keuangan dan memperluas wilayah mereka. Karya-karya ulama seperti Abu Yusuf dan al-Dawdi mencerminkan upaya merumuskan teori ekonomi Islam yang relevan dengan konteks sejarah masa itu. Buku-buku seperti 'Al-Khalaj' dan 'Al-Amwar' menjadi sumber penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa itu. Selain itu, peran penting ulama dalam membentuk kebijakan publik dan keuangan nasional. Mereka mempunyai tugas untuk memberikan nasihat kepada pihak berwenang dan merancang kebijakan yang sejalan dengan ideologi ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan yang adil dan bantuan kepada yang membutuhkan.

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Fatimiyah mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip agama dan praktik ekonomi yang dijalankan secara efektif dalam memperluas kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Ini menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam membentuk peradaban dan struktur sosial suatu masyarakat pada saat itu

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syalabi, (1974). *Mausu'ah Tarikh Islamiyah wa Hadharah Al-Islamiyah*, Jilid 4, Kairo: Maktabah al-Nahdiyah al-Misriyah, 1974, h. 293.
- Al-Daudi, *Kitab al-Amwal*, Editor: Muhammad Ridha Muhammad Salim, 70-78.
- Al-Maqrizi, Itti'azh, hlm. 306; Al-Hafizh Jalal ad-Din asSuyuti (selanjutnya disebut as-Suyuti), *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 482
- Anshary, A Hafiz, '(2016). *Pembangunan Ekonomi Di Masa Pemerintahan Dinasti Fatimiyah*', *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 7.1 (2016), 59–73
- Asriati Amaliyah, (2013). 'Eksistensi Pendidikan Islam Di Mesir Masa Daulah Fatimiyah Lahirnya Al-Azhar, Tokoh-Tokoh Pendidikan Pada Masa Daulah Fatimiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam', *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 16.1 (2013), 101–11
<<https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n1a9>>

- Delia Cortese, (2015). "The Nile; Its Role in The Fortunes and Misfortunes of the Fatimid Dynasty During its Rule of Eqypt (969-1171)", *History Compass* 13/1 (2015), h. 20. DOI. <https://doi.org/10.1111/hic3.12210>
- Didin Saefuddin Buchori, (2009). *Sejarah Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009, h. 146
- Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, (2019). *Perekonomian Islam; Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Kencana, 2019, h.
- Francesco Gabrieli, (1963). *The Arabs: A Compact History*, (New York: Hawthorn Books, Inc., 1963), hlm. 116.
- Hamim Umran, (2009). *Ara' al-Imam al-Daudi Fi Bab al-Mu'amalat Min Khilal al-Mi'yar al-Maghrif*, (al-Jazair: Jamiah al-Haj Lahdhar, 2009)
- Hasan Ibrahim Hasan (selanjutnya disebut Hasan), (1958). *Tarikh ad-Daulah al-Fatimiyyah fi al-Magrib wa Mishr wa Suriyah wa Bilad al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 527; Surur, op. cit., hlm. 68.
- Havis Aravik, (2016). *Ekonomi Islam; Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empat Dua Intranspublishing, 2016, h. 133.
- Johannes den Heijer, Yaacov Lev and Mark N. Swanson, (2015). "The Fatimid Empire and its Population", *Medieval Encounters*, Volume 21: Issue 4-5, 01 Dec (2015), h. 326. DOI. <https://doi.org/10.1163/15700674-12342200>
- M. Abdul Karim, (2007). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Books Publisher, 2007, h. 191
- Muhammad Jamal ad-Din Surur (selanjutnya disebut Surur), (1979). *Ad-Daulah al-Fatimiyyah fi al-Mishr* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1979), hlm. 152-159
- Muhammad Ziyab, al-Fikr al-Iqtisadi 'Inda Abi Jakfar Ahmad bin Nasr al-Daudi (2007); *Dirasah Tahliliyah Likitab al-Amwal*, (Al-Jazair: Jami'ah al-Haj Likhidhr, 2007).
- Philip K. Hitti (selanjutnya di sebut Hitti), (1973). *History of the Arabs* (London: Macmillan, 1973), edisi X, hlm. 626.
- Samsul Munir Amin, (2009). *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 265.
- Sherif Anwar dan Jere L. Bacharach, (2010). "Shi'ism and the Early Dinars of the Fatimid ImamCaliph al-Mu'izz lidin Allah (341-365/952-975); An Analytic Overview", *Al-Masaq*, Vol. 22, No. 3, December 2010, h. 259. DOI. <https://doi.org/10.1080/09503110.2010.522385>
- Susmihara, (2016). "Dinasti Fatimiyah; Muncul, Perkembangan dan Kehancurannya", *Jurnal Rihlah*, Vol 2 No.2/2016, h. 54. DOI. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v4i2.2830>.
- Suyuthi Pulungan, (2018). *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2018, h. 241.

Syamsuddin Nasution, (2013). Sejarah Peradaban Islam, Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013, h. 244.

Taqi ad-Din Ahmad bin `Ali al-Maqrizi, Kitab al-Mawa`izh wa al-I`tibar bi Dzikr al-Khithath wa al-Atsar yang lebih dikenal dengan nama al-Khithath al-Maqriziyah (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Jilid 1, hlm. 59.

Taqi ad-Din Ahmad bin `Ali al-Maqrizi (selanjutnya disebut Al-Maqrizi), (1971). Itti'azh al-Hunafa' bi Akhbar alA'immah al-Fathimiyyin al-Khulafa' (Kairo: al-Majlis al-A`la li asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1971), Jilid 1, hlm. 311.

Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and others, (2021) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)

Zamzam, Fakhry, and Havis Aravik, (2019) 'Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2019), 99
<<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.432>>